

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE MENGUNAKAN METODE *VALUE FOR MONEY*

oleh:

Harry Saputra Liando¹
David Paul Elia Saerang²
Inggriani Elim³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Samratulangi, Manado
e-mail : ¹ harry_jokey20@yahoo.com
² d_saerang@lycos.com
³ e_inggriani@yahoo.com

ABSTRAK

Kinerja keuangan merupakan sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan. Sejak diterapkan penganggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan secara baik. Meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2012 sampai 2013 dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode *value for money* untuk mengukur kinerja keuangan dari segi ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam laporan realisasi anggaran tahun 2012 dan tahun 2013. Hasil analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dari segi ekonomis disimpulkan bahwa pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengoptimalkan anggaran harus lebih hemat dan tepat sasaran, dari segi efisiensi harus ditingkatkan lagi sehingga masyarakat merasakan hasil otonomi terutama nominal anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, dan dari segi efektifitas dapat diperbaiki dengan upaya peningkatan secara berkesinambungan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebaiknya mengoptimalkan anggaran, serta aparatur pengelola anggaran agar dapat lebih tepat sasaran dan di nikmati oleh masyarakat.

Kata kunci: *value for money, ekonomi, efisiensi, efektifitas*

ABSTRACT

Financial performance is very important to be included in the public administration sector. By budgeting, since its performance local governments are required to be able to make a good financial performance. Rising public demands for accountability for the organization of the public sector, such as the regional and central govt. The government 's work, departments and state institutions are expected to reduce the waste, the fund programs to detect and economically. The aim of this research is to find out the financial performance of the island in 2011 until 2013 sangihe with deskriptif quantitative analysis method. By using the method of value for money to be measured in terms of economic, financial performance efficiency and effectiveness in the realization of the budget for 2012 and 2013 The results of an analysis of the financial performance of the government kepulauan sangihe in terms of economical concluded that the government kepulauan sangihe in optimizing the budget must be more efficient and right on target, in terms of efficiency must be improved, so people feel the results of autonomy especially nominal budget that is more inclined to the public interest, and in terms of the effectiveness of repairable with efforts to improve sustainably in order to increase public welfare. Because of that the government had to optimize apparatus budget management and budget so that could be effectively and in enjoy by the public.

Keywords: *value for money, economic, efficiency, effectiveness*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tidak ada lagi daerah kotamadya. Dan dalam Undang-Undang tersebut tidak dikenal lagi pembagian daerah sebagai daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Sehingga dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka daerah-daerah yang ada di Indonesia harus membiayai pembangunan daerahnya masing-masing tanpa mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat lagi.

Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi.

Pengukuran kinerja yang digunakan oleh organisasi sektor publik, adalah pengukuran kinerja yang tradisional. Metode ini memusatkan pada aspek keuangan saja. Namun dengan menggunakan metode *value for money*. *Value for money* menurut Mardiasmo (2002:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. ekonomis: pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. ekonomis merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. efisiensi: pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Data dari Badan Pusat Statistik (2013:5) Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki luas wilayah 1.012,94 km² dan berpenduduk sebanyak 128.732 jiwa. Sebagai salah satu kabupaten terbesar di Sulawesi Utara, pemerintah kabupaten terus mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan terhadap masyarakat.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 31 Desember tahun 2012

No.	Uraian	Target 2012(Rp)	Realisasi 2012(Rp)	%
1	Pendapatan	536.584.670.123,00	532.876.695.669,17	99,31
2	Pendapatan Asli Daerah	30.468.830.988,00	27.988.410.577,75	91,86
3	Belanja	573.918.744.933,00	538.843.703.029,00	93,89

Sumber : Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2012

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 31 Desember tahun 2013

No	Uraian	Target 2013(Rp)	Realisasi 2013(Rp)	%
1	Pendapatan	620.773.060.325,48	618.793.331.352,39	99,68
2	Pendapatan Asli Daerah	34.620.154.464,48	32.165.776.372,39	92,91
3	Belanja	644.648.962.975,54	598.076.222.875,00	92,78

Sumber : Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2013

Laporan realisasi anggaran tahun 2012 secara keseluruhan memperlihatkan bahwa target penerimaan ditetapkan sebesar Rp 536.584.670.123 dan realisasinya sebesar Rp 532.876.695.669,17 atau 99,31 %. Selanjutnya untuk tahun 2013 target penerimaan sebesar Rp 620.773.060.325,48 dan realisasi penerimaan Rp 618.793.331.352,39 atau 99,68 %. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa baik penerimaan maupun belanja setiap tahunnya menunjukkan kenaikan. Apabila dilihat dari pendapatan asli daerah dimana target penerimaan yang ditetapkan tahun 2012 sebesar Rp 30.468.830.988,00 dan realisasinya Rp 27.988.410.577,75 atau 91,86 %. Untuk tahun 2013 target penerimaan dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 34.620.154.464,48 dan realisasinya

sebesar Rp 32.168.776.372,39 atau 92,91%. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja dimana target tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp 573.918.744.933 dan realisasi belanja sebesar Rp 538.843.703.029,00 nampak bahwa belanja masih lebih besar dari penerimaan. Hal ini berbeda dengan belanja tahun 2013 dimana target belanja yang ditetapkan sebesar Rp 644.648.962.975,54 dan realisasi belanja sebesar Rp 598.076.222.875. masih dibawah total realisasi penerimaan. Dari laporan keuangan memperlihatkan bahwa pengeluaran masih didominasi dari belanja pegawai.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe di tinjau dari segi ekonomis, efisiensi dan efektifitas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Mahmudi (2011:34) mengungkapkan bahwa Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan. Selain itu, kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat dari hasil opini auditor. Jika laporan hasil pemeriksaan(LHP) auditor independen memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka hal itu menandakan laporan keuangan yang disajikan sangat baik. Jika opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) maka hal mengindikasikan laporan keuangan disajikan cukup baik. Jika opini yang diberikan Tidak Wajar (TW), maka hal itu menunjukkan laporan keuangan buruk. Jika auditor memberikan pendapat *Disclaimer Opinion*, maka hal itu menunjukkan laporan keuangan sangat buruk.

Value for Money

Value for money menurut Mardiasmo (2002:130) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomis: pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi: pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Mahmudi (2010:20) mendefinisikan *value for money* sebagai penghargaan terhadap nilai uang, hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus di hargai secara layak dan di gunakan sebaik-baiknya. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama sehingga benar-benar menggambarkan kinerja pemerintah yang sesungguhnya.

Indikator Value for Money

Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Mardiasmo (2002:130) mengungkapkan Indikator *Value for Money* dibagi menjadi dua bagian yaitu indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan (efektifitas). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (seperti staf, upah, biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan. Sedangkan indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program.

Indikator efisiensi dan efektifitas harus digunakan secara bersama-sama. Karena disatu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi *output* yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Atau di lain pihak sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan. Akan tetapi mungkin dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisien. Jika suatu program efektif dan efisien maka program yang dijalankan dapat dikatakan *cost-effectiveness*. Indikator efektifitas biaya

merupakan kombinasi informasi efisiensi dan efektifitas dan dapat memberikan ukuran kinerja *bottom line* yang dalam sektor publik diidentikkan dengan pelayanan publik.

Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan *Value for money*

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik (Mardiasmo (2002:130)). Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya mengukur *output* karena *output* yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa *output* yang berwujud (*tangible output*), tetapi kebanyakan juga bersifat *output* tidak berwujud (*intangibile output*). Ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan indikator kinerja. Perbedaan antara ukuran kinerja dengan indikator kinerja adalah:

1. Ukuran kinerja, umumnya mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, misalnya: laporan keuangan pemerintah.
2. Indikator kinerja, mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Ekonomis

Ekonomis terkait dengan pengkonversian *input* primer berupa sumber daya keuangan menjadi *input* sekunder berupa tenaga kerja, bahan infrastruktur, dan barang modal yang di konsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Ekonomis memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya di peroleh dengan harga lebih rendah yaitu harga yang mendekati harga pasar. Secara matematis ekonomis merupakan perbandingan antara *input* dengan nilai rupiah untuk memperoleh *input* tersebut.

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{input}}{\text{harga input (Rp)}} \times 100 \% \quad \dots\dots\dots(\text{Mahmudi, 2011:21})$$

Ekonomis merupakan konsep yang sifatnya relatif. Relatifitas konsep ekonomi tersebut bisa di sebabkan karena faktor lokasi dan waktu kedua faktor tersebut terkait dengan harga pasar yang berbeda. Harga pasar untuk *input* yang sama bisa berbeda karena waktu dan lokasi yang berbeda.

Efisiensi

Efisiensi terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang di hasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Suatu organisasi program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100 \% \quad \dots\dots\dots(\text{Mahmudi, 2011:22})$$

Efektifitas

Efektifitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektifitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya di capai. Efektifitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *input* atau proses, maka efektifitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau di katakan *spending wisely*.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{outcome}}{\text{output}} \times 100 \% \quad \dots\dots\dots(\text{Mahmudi, 2011:22})$$

Penelitian Terdahulu

Kurrohman (2013) dalam penelitian berjudul *Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value for Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*. Dalam penelitian ini penulis ingin menguji kinerja keuangan pemerintah daerah setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja dengan pendekatan *Value for Money*. Dengan melakukan uji beda sebelum menggunakan anggaran berbasis kinerja dengan sesudah menggunakan anggaran berbasis kinerja. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisien dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Taufik Kurrohman (2013) terletak pada penggunaan variabel *Value for Money* dalam pengukuran kinerja pemerintah. Sedangkan perbedaannya terletak pada waktu dan tempat pelaksanaan penelitian.

Nazril (2013) dalam penelitian berjudul *Penerapan Konsep Value for Money dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar*. Tujuan penelitian ini adalah mengukur tingkat kinerja instansi pemerintah, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar untuk tahun anggaran 2011 dan sebagai gambaran penggunaan konsep *value for money* pada instansi pemerintah. Penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif (*descriptive quantitative analysis method*), yaitu dengan menerapkan konsep *value for money* sebagai alat pengukuran kinerja. Unsur-unsur dari konsep *value for money*, yaitu menghitung tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas dari penggunaan anggaran tahun 2011. Hasil penelitian ini, yaitu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar telah memenuhi prinsip *value for money*, yaitu ekonomis, efisien dan efektifitas. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis kuisioner yang disebarakan kepada pelanggan/konsumen.

Alni (2006) dalam penelitian berjudul *Analisis kinerja keuangan belanja kegiatan dengan pendekatan value for money pada Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Alat analisis yang digunakan adalah pengukuran efisiensi dan pengukuran efektifitas, berdasarkan hasil pengukuran pada indikator masukan (*input*) menunjukkan bahwa biro-biro yang terdapat pada instansi Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2004 tidak menggunakan semua *input* dana/anggaran dari yang telah dianggarkan /direncanakan untuk setiap kegiatan, sedangkan jika dilihat dari pengukuran indikator keluaran (*output*) dapat dilihat bahwa sebagian besar target pencapaian fisik berhasil direalisasikan. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran hasil (*outcome*) dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan umumnya merasa puas dengan pencapaian rata-rata 70%.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hubungan kausal (*causal effect*) penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh fakta dan fenomena serta mencari keterangan secara faktual yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan metode *value for money*.

Jenis Data dan Sumber Data

Data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Kuncoro (2013:124) mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu data yang diperoleh secara langsung pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe baik melalui wawancara langsung, maupun dengan pemberian kuisioner kepada para pegawai. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga pengumpul data atau pihak-pihak lain yang datanya telah diolah terlebih dahulu.

Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data yang akurat
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pimpinan dan pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan serta arsip-arsip perusahaan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.
4. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mempelajari berbagai literatur, buku, referensi, dan sebagainya yang digunakan dalam penelitian ini.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan kesimpulan yang jelas dan objektif terhadap masalah yang ada yaitu mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan metode *value for money*, yaitu dilihat dari segi ekonomis, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Untuk mengukur kinerja secara ekonomis digunakan formula sebagaimana diuraikan dalam tinjauan pustaka oleh Mahmudi (2011:21) yaitu :

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{input}}{\text{anggaran (Rp)}} \times 100\%$$

Mengukur kinerja dari segi efisiensi dapat menggunakan formula :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$$

Mengukur kinerja dari segi efektifitas maka formulanya adalah :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{outcome}}{\text{output}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2012 dan tahun 2013

Kinerja Keuangan ditinjau dari segi ekonomis

Nilai ekonomis tahun 2012 :

$$\begin{aligned} \text{Ekonomis} &= \frac{\text{input}}{\text{anggaran (Rp)}} \times 100\% \\ &= \frac{538.843.703.029,00}{573.918.744.933,00} \times 100\% = 93,89\% \end{aligned}$$

*Keterangan :

Input = Realisasi Belanja Tahun 2012

Anggaran = Target Belanja Tahun 2012

Nilai ekonomis tahun 2013 :

$$\begin{aligned} \text{Ekonomis} &= \frac{\text{input}}{\text{anggaran (Rp)}} \times 100\% \\ &= \frac{598.076.222.875,00}{644.648.962.975,00} \times 100\% = 92,78\% \end{aligned}$$

*Keterangan :

Input = Realisasi Belanja Tahun 2013

Anggaran = Target Belanja Tahun 2013

Kinerja keuangan ditinjau dari segi efisiensi

Nilai efisiensi tahun 2012 :

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\% \\ &= \frac{95,53}{92,41} \times 100\% = 103,37\% \end{aligned}$$

Nilai efisiensi tahun 2013 :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$$

$$= \frac{93,29}{92,90} \times 100\% = 100,41\%$$

Kinerja Keuangan Ditinjau dari Segi Efektifitas

Nilai efektifitas tahun 2012:

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{\text{outcome}}{\text{output}} \times 100\% \\ &= \frac{538.843.703.029}{573.918.744.933} \times 100\% = 93,89\% \end{aligned}$$

*Keterangan:

outcome = Realisasi Belanja 2012
output = Target Belanja 2012

Nilai efektifitas tahun 2013:

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{\text{outcome}}{\text{output}} \times 100\% \\ &= \frac{598.076.222.875}{644.648.962.975} \times 100\% = 92,78\% \end{aligned}$$

*Keterangan:

outcome = Realisasi Belanja 2013
output = Target Belanja 2013

Tabel 3. Hasil Pengukuran Kinerja Keuangan dengan metode *Value for Money*

Pengukuran	Tahun 2012(%)	Tahun 2013(%)
Ekonomis	93,89	92,78
Efisiensi	103,37	100,41
Efektifitas	93,89	92,78

Sumber: Data Olahan 2013

Pembahasan

Anggaran pendapatan dan belanja daerah pada kondisi era otonomi seperti sekarang ini disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang digunakan. Sudah tentu pemerintah daerah berupaya melakukan kontrol dengan berpegang pada prinsip pengelolaan yang baik guna mencapai *good governance*.

Kinerja Keuangan Ditinjau dari Segi Ekonomis

Hasil analisis dari segi ekonomis dimana untuk tahun 2013 terjadi sedikit penurunan di banding dengan tahun 2012. Pada penerimaan/pendapatan untuk tahun 2012 dan Realisasi Anggaran Belanja menunjukkan kenaikan, artinya realisasi belanja lebih besar dari total realisasi penerimaan daerah secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan tahun 2013 dimana Realisasi Anggaran Penerimaan/Pendapatan dan realisasi anggaran belanja menunjukkan terjadi penurunan. Hasil analisa ekonomis berdasarkan data laporan keuangan dari jumlah realisasi belanja menunjukkan bahwa komponen belanja modal masih didominasi oleh belanja pegawai. Karena itu optimalisasi pengelolaan anggaran yang berpihak kepada pelayanan publik sangatlah penting.

Kinerja Keuangan Ditinjau dari Segi Efisiensi

Hasil analisa efisiensi untuk tahun 2012 dan tahun 2013, menunjukkan bahwa dapat dikatakan kinerja pengelolaan anggaran belanja pemerintah sudah baik karena nilai *output* lebih besar dari nilai *input* yang digunakan. Sejalan dengan upaya memantapkan kemandirian pemerintah yang pada hakekatnya diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya untuk menggali potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan guna kesejahteraan masyarakat dan mendorong masyarakat ikut serta berperan dalam pembangunan di daerah.

Kinerja Keuangan Ditinjau dari Segi Efektifitas

Anggaran pendapatan dan belanja daerah pada era sekarang ini semuanya disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Artinya diupayakan dengan *input* yang digunakan menghasilkan *output* yang lebih maksimal. Dari hasil analisa diatas menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penggunaan anggaran dan alokasi anggaran secara nominal tahun 2012 lebih kecil dari tahun 2013, artinya bahwa pengelolaan anggaran ditahun 2012 lebih efektif dibanding dengan tahun 2013 walaupun pengukuran kinerja efektifitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, namun efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Penelitian Nazril (2013) yang menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa telah memenuhi prinsip metode *value for money* yaitu ekonomis, efisiensi dan efektif yang berpengaruh baik terhadap pengelolaan kinerja keuangan, sedangkan dalam penelitian ini masih ada beberapa kinerja keuangan yang harus di perbaiki untuk memenuhi prinsip metode *value for money* untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya untuk menggali potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan guna kesejahteraan masyarakat dan mendorong masyarakat ikut serta berperan dalam pembangunan didaerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah :

1. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengoptimalisasi aggaran harus lebih hemat dan tepat sasaran.
2. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe harus ditingkatkan lagi sehingga masyarakat merasakan hasil otonomi terutama nominal anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat
3. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat diperbaiki dengan upaya adanya peningkatan secara berkesinambungan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Saran yang penulis sampaikan untuk pertumbuhan ekonomi serta pengelolaan kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sangihe antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengoptimalisasi anggaran harus ditingkatkan sebagaimana visi dan misi dan jiwa otonomi daerah.
2. Meningkatkan kinerja keuangan sehingga masyarakat merasakan hasil otonomi terutama nominal anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana agar hasil kinerja dinikmati oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alni, Ilham. 2006. Analisis kinerja keuangan belanja kegiatan dengan pendekatan *value for money* pada sekretariat daerah provinsi Sulawesi selatan. *Skripsi* Universitas Hasanudin <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1885>. Diakses tanggal 4 Februari 2014, Hal 2 - 14.

Badan Pusat Statistik Kab. Sangihe. 2013. *Sangihe Dalam Angka*. Tahuna.

Kurrohman, Taufik. 2013. Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di JawaTimur. *Jurnal Dinamika Akuntansi* Volume 5 No 1 (2013) Universitas Jember <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/view/2558>. Diakses tanggal 24 Januari 2014, Hal 1 – 8.

- Mudrajad, Kuncoro. 2003. *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- _____. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press, Yogyakarta.
- Nazril, Naim. 2013. Penerapan Konsep Value for Money dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar. *Skripsi Universitas Hasanudin* <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/6634>. Diakses tanggal 4 Februari 2014, Hal 5 - 23.
- Republik Indonesia. 1999. Undang - Undang Otonomi Daerah nomor 22 tahun 1999. Otonomi Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan pemerintah nomor 105 tentang pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal Pelayanan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang – Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah. Jakarta.

